

DAFTAR BACAAN

- Abdul, W. S. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Anonymous, 2005. Peningkatan Kesejahteraan Guru Baru Dimulai 2007. www.pml.ac.id
- Anonymous, 2006. Kebijakan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. www.portalphp.dit-php.display
- Chan, S.M. & Sam, T.T. 2005. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Penerbit: Cintra Umbara, Bandung.
- Depdiknas. 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP): Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Bandung: Fokusmedia.
- Fasli, J. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Fattah, N. 2004. . Hukum Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Friedman, Lawrence, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Ghozali, A. 2004. Peranan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonom. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 dan 16 September 2004.
- Habermas, Jurgen, 1973, Legitimation Crisis, London: Deacon, Press.
- Hamalik. 2004. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Pribumi Aksara)
- Hasri, S. 2004. Hukum Pendidikan: Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi. Makasar: YAPMA.
- Idris, Zahara dan Lisma Jamal. 1992. Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana.
- Immegart, Glenn L dan Francis J. Pilecki, 1972, An Intoduction to Systems for to Educational Administrator, California: Addison Wesley Publishing Company.
- Jones, O.C.1996. Pengantar Kebijakan Publik . Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Komaruddin, 1972. Ensiklopedia Hukum Pendidikan. Bandung: Alumni

- Kydd, L. et. al. 2004. Professional Development for Educational Management: Pengembangan Profesional untuk Hukum Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
- Lave, J, & Wenger, E. 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Practice. New York: Cambridge University Press.
- Lincoln E.G. & Guba Y.S. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills. SAGE Publications. Inc.
- Mc. Ashan, H.H., 1983, Comprehensive Planning for School Administrations, USA: Advocate Publishing Group.
- Mazmanian, D.H. & Paul, A.S, 1987. Implementation and Public Policy, New York: Harper Collins.
- Masruri, Siswanto. 2002. Kualitas Pribadi dan Keterampilan Supervisi. Jakarta: Panjimas
- Muhadjir, N. 2000. Kebijakan dan Perencanaan Sosial: Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edisi I. Yogyakarta:
- Newig, Gunther, & Pahl-Wastl. 2010. Synapses in The Network: Learning in Governance Networks in The Context of Environmental Management. Journal ecology and society: 15(4),
- Patton, V. Carl. & Sawicki, David. 1986. Basic Methodes of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, Cliffs, NJ. 07632.
- Perry. L, James. 1996. Hand Book of Public Administration, Abson Book. Inc, USA.
- Pusdiklat Spimnas. 2001. Kajian Kebijakan Publik. Lembaga Administrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Putra, F. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik .Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerjasama Universitas Sunan Giri Surabaya
- Rake Sarasin. Parsons, W. 1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme, US.
- Sagala, S. 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni.
- _____, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- _____, "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", dalam Kompas 15 Juni 2002.
- _____, "Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif", dalam Kompas 6 September 2002.
- Siagian, S.P. 1985. Analisis serta perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Soenarko, 2000. Analisis Kebijakan Publik. Pusat Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Supandi dan Sanusi A, 1998. Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. (Jakarta : Depdikbud)
- Supriadi, D. 1999. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Jakarta: Adi Cita Katya Nusa.
- Supriadi, D. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Rosdakarya.
- Suryadi, A. & Tilaar, H.A.R., 1994. Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Thoha, M. 2002. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tilaar, H. A. R. 1995. Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tirtarahardja, Umar dan. S.L. La Sulo, 2005. "Pengantar Pendidikan", Penerbit Rineksa Cipta Jakarta
- Tudor, Sofia Loredana. 2013. Formal, nonformal, informal in education. Sciverse Sciencedirect, Procedia Social and Behavioral Science.
- Umar, T. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Uzur, U.M. 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya
- Wibawa, S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Zumwalt, K. 1989. Beginning Professional Teachers: the Need for a Curricular Vision for Teaching. Dalam M. C. Reynold (ed). Knowledge Base for Beginning Teachers. New York: Pergamon Press.

Makalah :

- Laporan Bank Dunia: Education in Indonesia. (1998, September). From Crisis to Recovery.
- Lembaga Pengembangan Hukum Pendidikan. (1996). Model dan pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Pendidikan. Jakarta: LPPM
- Makalah Konperensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan. (1999, February). Jalan Menuju Pembaruan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat, Jakarta
- Media MNPK NO. 6 TH. XX. (April 2000-Mei 2000). Hukum Berbasiskan Sekolah di tingkat Pendidikan Dasar; oleh Jiyono.
- Regional Educational Development and Improvement Project (Redip). (1999, November): Interim Report 1. Jakarta.
- Reports to Unesco of the Internatinal Commission on Education for the Twenyfirst Century (1996). Learning The reasure Within.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 649/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen tahun anggaran 2008;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118/1996 yang dirubah dengan Keputusan Menpan No. 91/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Masyarakat yang Belajar Mandiri.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 87/2002 tentang Akreditasi Sekolah.
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Hukum Dikdasmen, Depdiknas Nomor 818a/C3/KEP/2007, tanggal 24 April 2007 tentang Penetapan SMP Standar Nasional Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No 17 Tentang Pengeloan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Manajemen;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tanggal 15 September 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, tanggal 17 April 2007
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Tanggal 4 Mei 2007.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Nasional Tahun Anggaran 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat.
- Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 2007. Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;

Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Rekening Sekolah;